



dipahami dan disepakati secara bersama-sama sebagai realitas yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi yang ada.

2. Aspek yang ditonjolkan oleh portal media *online* *kompas.com* adalah DPR dan Pemerintah memberikan tanggapan mengenai uji materi yang diajukan Ahok. Kedua pihak ini menolak apa yang digugat oleh Ahok mengenai UU Pilkada. Ahok dianggap tidak konsisten mengenai gugatan UU Pilkada tersebut, dikarenakan Ahok pernah meminta Fauzi Bowo yang saat itu menjadi calon petahana untuk mengajukan cuti. Sama halnya dengan yang ditonjolkan *jawapos.com*, *kompas.com* juga menonjolkan bahwa Yusril Ihza Mahendra tidak setuju dengan apa yang digugat Ahok. Yusril mengatakan bahwa Ahok harus memiliki kepastian bahwa pasal tersebut memang mengandung ketidakjelasan. Namun, pada pembingkai yang dilakukan oleh *kompas.com* ditekankan bahwa Ahok yakin jika calon petahana tidak perlu cuti, karena tidak ada hak konstitusional yang dilanggar. Sejalan dengan pendapat Ahok, Mantan Hakim MK Harjono, menilai jika cuti adalah hak setiap orang dan konstruksi cuti kampanye dalam UU Pilkada tersebut dianggap tidak jelas. Dalam penonjolan aspek-aspek ini terlihat bahwa *Kompas.com* membingkai isu ini sebagai peristiwa sebagai sebuah kontroversi, yaitu dengan menunjukkan bahwa realitas yang terjadi masih diperdebatkan atau dipandang kontroversial.

Maka dari dua aspek diatas tadi dapat disimpulkan bahwa Jawa Pos dan Kompas memiliki tujuan yang sama yaitu cenderung memperhatikan keuntungan segi ekonomi dibalik berita-berita politik yang mereka tuliskan. *Kompas.com* memiliki kecenderungan menampilkan sisi positif yang ada pada diri Ahok pada



